

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Raperda ERP Ditarik, Pemprov Tak Profesional

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo telah berjanji di depan massa ojol untuk menarik kembali raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang di dalamnya ada wacana jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar menyebut penarikan kembali raperda yang sudah masuk prolegda memang diperbolehkan secara aturan.

Adapun pembahasan mengenai raperda PL2SE, kata Basri Umar juga masih tahap awal.

"Tapi prinsipnya itu bisa saja [dicabut raperda] masa gaboleh. Apalagi kalau faktornya untuk kebaikan bukan faktor ya, apalagi tujuannya untuk kebaikan," kata Basri Umar di DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Hanya saja, secara etika dia menilai penarikan kembali raperda yang sudah masuk ke DPRD itu sebagai bentuk ketidakprofesionalan Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji sebuah wacana kebijakan.

"Iya pasti kalau mereka ingin menarik dengan alasan bahwa

mereka merasa ada yang harus diperbaiki atau belum sempurna.

Yaitu artinya berarti ya mereka tidak profesional dalam mengikuti proses dan kajian untuk mengajukan perda," papar Basri Umar.

Politikus NasDem itu mengatakan prosedur penarikan raperda bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan mengirimkan surat kepada DPRD DKI.

Kemudian, Bapemperda akan memanggil pihak Pemprov DKI Jakarta untuk meminta penjelasan mengapa hingga akhirnya mencabut raperda yang sudah diajukan.

"Jika memang masuk akal atau memang demi kebaikan bisa saja ditarik kembali," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, saat menemui massa ojol yang berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (8/2/2023), Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo berjanji untuk tak melanjutkan pembahasan ERP dengan DPRD DKI Jakarta.

"Saya tegaskan saat ini raperda sudah berada di DPRD. Kami akan koordinasikan dengan DPRD untuk

raperdanya dikembalikan ke Pemprov," janji Syafrin di depan massa ojol. (Tribunnews)



istimewa